

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dinamika sosio-ekologis yang muncul dari pembangunan infrastruktur tanggul di pesisir Kabupaten Pekalongan, sebagai upaya negara dalam mengatasi persoalan banjir rob. Alih-alih menciptakan perlindungan dan keselamatan secara menyeluruh bagi masyarakat pesisir Kabupaten Pekalongan, kehadiran infrastruktur ini justru menciptakan segregasi sosio-spasial antara “wilayah kering” yang dilindungi dan “wilayah basah” yang dikorbankan. Penelitian ini berfokus kepada kehidupan masyarakat Dusun Pantairejo sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidup di “wilayah basah”, yang secara sadar ditempatkan di luar skema perlindungan negara. Dengan menggunakan pendekatan etnografi melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana masyarakat menavigasi kehidupan mereka di tengah ketidakpastian perubahan lingkungan dan tekanan berlapis akibat kombinasi rob dan infrastruktur tanggul.

Kerangka konseptual penelitian ini mengacu pada “janji infrastruktur” milik Appel *et al.* (2018) untuk memahami dimensi politik dari pembangunan tanggul dan navigasi sosial milik Hendrik Vigh (2009) untuk melihat agensi masyarakat yang menjadi subjek politik dari kehadiran tanggul. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian berlapis (alam dan politik infrastruktur), masyarakat Pantairejo membuktikan bahwa mereka bukan korban pasif. Mereka adalah “pelaut ulung” yang menavigasi perubahan dengan mengenali domain baru (lahan basah) sebagai cara menyusun strategi dan melakukan taktik (ekstraksi, layanan jasa, ngurug rumah, memperbaiki infrastruktur publik) untuk bertahan hidup dan mempertahankan ruang hidupnya.

Kata kunci: antropologi infrastruktur, banjir rob, navigasi sosial, Pekalongan.

ABSTRACT

This research aims to examine the socio-ecological dynamics emerging from seawall infrastructure development along the coast of Pekalongan Regency, as part of the state's efforts to address tidal flooding (rob) issues. Rather than creating comprehensive protection and safety for coastal communities in Pekalongan Regency, the presence of this infrastructure has instead created socio-spatial segregation between the "dry zones" that are protected and the "wet zones" that are sacrificed. This research focuses on the lives of the Pantairejo hamlet community as a group living in the "wet zone," deliberately positioned outside the state's protection scheme. Using an ethnographic approach through participant observation, in-depth interviews, and literature review, this study analyzes how communities navigate their lives amid environmental uncertainty and multilayered pressures resulting from the combination of tidal flooding and seawall infrastructure.

The conceptual framework of this research draws on Appel et al. (2018) concept of promise of infrastructure to understand the political dimensions of embankment construction, and Hendrik Vigh's (2009) notion of social navigation to examine the agency of communities as political subjects shaped by the presence of infrastructure. The findings of this study reveal that amid layered uncertainties—both environmental and political—residents of Pantairejo demonstrate that they are not passive victims. They are "*skilled navigators*" who adapt to change by recognizing new domains (wetlands) as spaces for strategizing and exercising tactics (resource extraction, service provision, house elevation, and public infrastructure repair) to sustain their livelihoods and preserve their living spaces.

Keywords: anthropology of infrastructure, tidal flood, social navigation, Pekalongan.